

PENGARUH KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Andina Dwi Paramita

Marsono ¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The objective of this research was to analyze which characteristics of corporate governance that influence the extent of corporate social responsibility (CSR) disclosures in the companies which operate in the mining and mining service sector in Indonesia. Corporate governance characteristics which were used, namely size of board of commissioner, independent commissioner, composition of women on board, audit committee, ownership concentration, managerial ownership, foreign ownership, government ownership, and public ownership. The extent of CSR disclosure was measured using corporate social disclosure index (CSDI) based on Global Reporting Initiative (GRI) reporting standard items which were disclosed in companies' annual report. This research also used firm's size and profitability as control variables.

The population of this research are companies which operate in the mining and mining service sector that listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in the period 2010 until 2012. Using purposive sampling method, then total sample of this research became 48 annual reports of mining companies. Multiple regression method was used to analyze the relationship between corporate governance characteristics and CSR disclosure.

The results show that composition of women on board and managerial ownership has a significant effect toward the extent of CSR. The results also show that both of control variables have significant effects on the extent of CSR.

Keywords: corporate social responsibility, board characteristics, audit committee, ownership structure

PENDAHULUAN

CSR menggiring perusahaan yang dulunya hanya berorientasi pada maksimalisasi laba (*profit*), kini menjadi peduli terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) serta keseimbangan lingkungan (*planet*). Praktik pengungkapan CSR memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, menurut Ghazali dan Chariri (2007), pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Selain itu, pengungkapan CSR dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan.

Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007 dalam Mulia, 2010). Menurut Said *et.al.* (2009) *Corporate Governance* sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* (Waryanto, 2010). Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan GCG adalah pengelolaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu kewajaran (*fairness*), transparansi (*disclosure/transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), prinsip-prinsip tersebut ditambah satu lagi, yaitu independensi (*independency*). Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, khususnya dalam prinsip tanggung jawab, secara jelas dinyatakan, “Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang terkait antara *corporate governance* dengan *corporate social responsibility*.”

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

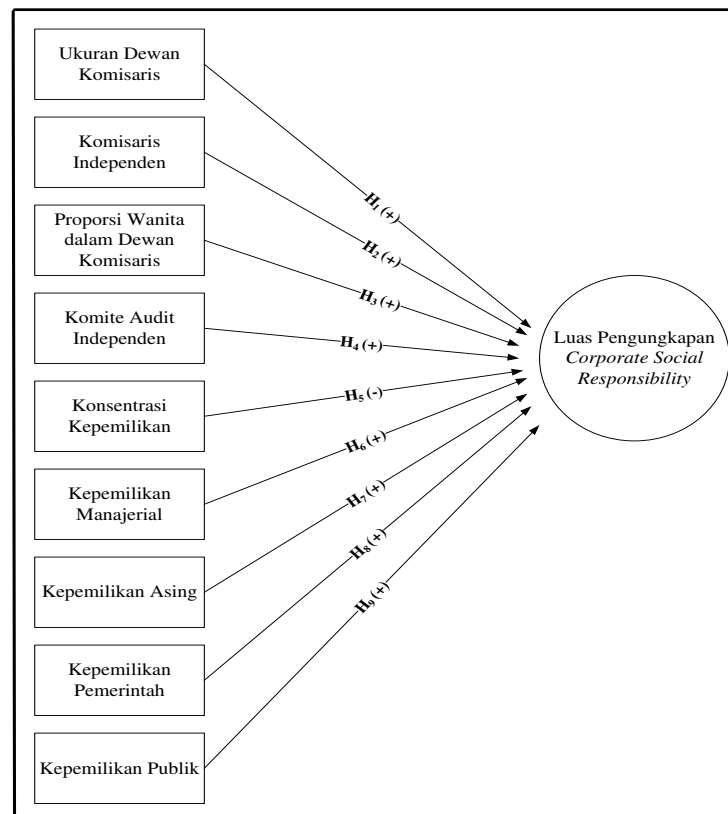
Kerangka Pemikiran

Praktik pengungkapan CSR memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak terhadap masyarakat tersebut. Hal ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan salah satu asas *good corporate governance*, yaitu *responsibility*. *Good corporate governance* dan CSR di Indonesia diatur di dalam Pedoman Umum GCG dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan CSR ke dalam *annual report* perusahaan. Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penelitian

terdahulu, maka peneliti mengindikasikan karakteristik *corporate governance* berupa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik sebagai variabel independen penelitian yang mempengaruhi luas pengungkapan CSR sebagai variabel dependen penelitian.

Skema Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

1. Ukuran Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Menurut Akhtaruddin *et al.* (2009), semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang besar dipandang sebagai mekanisme *corporate governance* yang efektif. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi CSR lebih banyak,

sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR (Putra, 2011).

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

2. Komisaris Independen dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan para pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen dipandang sebagai alat untuk memonitor perilaku manajemen (Rosenstein dan Wyatt, 1990 dalam Said *et al*, 2009), yang nantinya dapat menghasilkan lebih banyak informasi pengungkapan sukarela perusahaan. Forker (1992) dalam Said *et al.*(2009) menemukan bahwa semakin besar prosentase anggota independen yang ada pada dewan komisaris, akan meningkatkan aktivitas monitoring terhadap kualitas pengungkapan keuangan dan mengurangi kepentingan dari kegiatan menutup-nutupi informasi.

H2: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

3. Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Perusahaan dengan kehadiran wanita dalam anggota dewan cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih kuat dibandingkan yang hanya mempunyai sedikit atau tidak ada sama sekali wanita dalam struktur dewan (Rosener, 2003 dalam Bernardi dan Threadgill, 2010) dan mempedulikan kebutuhan *stakeholder* yang lebih luas dibandingkan dewan komisaris laki-laki (Konrad dan Kramer, 2006 dalam Bernardi dan Threadgill, 2010). Dewan komisaris wanita juga cenderung lebih menggunakan kinerja non-finansial seperti inovasi dan tanggung jawab sosial untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dibandingkan dengan dewan laki-laki (Stephenson, 2004 dalam Bernardi dan Threadgill, 2010). Adams dan Ferreira (2004) dalam Khan (2010) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris wanita yang lebih tinggi cenderung membuat pola kehadiran yang khusus pada pertemuan dewan komisaris, dimana membuat dewan komisaris yang berbeda lebih sukses dibandingkan dewan komisaris yang homogen.

H3: Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

4. Komite Audit dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Komite audit berperan dalam melakukan *review* terhadap proses perusahaan untuk data finansial dan *review* pengendalian internal. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit memainkan peran yang efektif dalam meningkatkan standar *corporate governance*. Wright (1996) dalam Said *et al.* (2009) menemukan bahwa komposisi komite audit berkaitan erat dengan pelaporan keuangan. Forker (1992) dalam Said *et al.* (2009), menyatakan bahwa keberadaan komite audit dengan proporsi anggota independen yang lebih besar, dapat mengurangi *agency cost* dan meningkatkan pengendalian internal, yang nantinya akan mengarah pada kualitas pengungkapan yang lebih baik.

H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

5. Konsentrasi Kepemilikan (*Ownership Concentration*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Suatu perusahaan dikatakan terkonsentrasi apabila hak suara terbanyak dipegang oleh suatu institusi maupun perorangan. Menurut Ho dan Wong (2001) dalam Matoussi dan Chakroun (2008), ketika proporsi saham dimiliki oleh segelintir pihak, maka konflik kepentingan yang terjadi bukanlah antara manajer dengan *shareholders*, melainkan antara *large shareholders* dengan *small shareholders*. Pada situasi yang demikian, manajer mendapat insentif untuk bertindak bertentangan dengan kepentingan *small shareholders* dengan cara mengurangi kualitas pengungkapan. Abdul Samad (2002) dalam Said *et al.* (2009) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi mengakibatkan pemegang saham minoritas menjadi *powerless* untuk mencegah pemegang saham mayoritas dalam penerapan rencana mereka terhadap perusahaan.

H5: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*

6. Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham, yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross *et al.*, 2004; Listiyono, 2004 dalam Nugroho, 2008). Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan *image* perusahaan, semakin bagus *image* perusahaan maka harapannya

adalah semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, dan *return* yang diperoleh pemegang saham yang tidak lain adalah manajemen akan semakin besar.

H6: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*

7. Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Jika dilihat dari sisi *stakeholder*, pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995 dalam Barkemeyer, 2007). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya.

H7: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*

8. Kepemilikan Pemerintah (*Government Ownership*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan, mungkin dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR

H8: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*

9. Kepemilikan Publik (*Public Ownership*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan akan semakin luas. Khan *et al.* (2012) menyebutkan bahwa ketika suatu perusahaan mulai *go public*, secara langsung akuntabilitasnya terhadap publik yang merupakan pemegang saham akan sangat diperlukan. Ada penekanan terhadap akuntabilitas akan menyebabkan perusahaan

mengungkapkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan *visibility* dan *accountability* perusahaan terhadap sejumlah besar *stakeholder*. Untuk itu diperlukan keterlibatan perusahaan yang lebih dalam kegiatan sosial yang kemudian akan diungkapkan.

H9: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, serta kepemilikan publik. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (total aset) dan profitabilitas (ROA).

Variabel	Operasionalisasi Variabel
CSDI	$\frac{\text{Jumlah mandatory item CSR menurut GRI yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item informasi CSR yang diwajibkan}}$
Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan
Komisaris Independen	$\frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$
Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris	$\frac{\text{Jumlah anggota komisaris wanita}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$
Komite Audit	Jumlah seluruh anggota komite audit
Konsentrasi Kepemilikan	$\sum_{i=1}^n (\text{Kepemilikan Pemegang Saham Mayoritas})^2$
Kepemilikan Manajerial	$\frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$
Kepemilikan Asing	$\frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$
Kepemilikan Pemerintah	$\frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$

Kepemilikan Publik	$\frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh publik}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$
--------------------	--

Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan - perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian *purposive sampling*, dengan harapan peneliti mendapatkan informasi dari kelompok sasaran spesifik (Sekaran, 2008). Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah:

1. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012, karena karena perusahaan sektor pertambangan termasuk perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang diwajibkan melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Perusahaan tersebut mempublikasikan *annual report* tahun 2010-2012 secara lengkap dan dapat diakses melalui *website* perusahaan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada, berupa *annual report* tahun 2010-2012, ICMD, dan studi pustaka atau literatur berupa jurnal, penelitian terdahulu, buku, dan situs internet yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan.

Metode Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* dengan model regresi sebagai berikut:

$$\text{CSDI} = \beta_0 + \beta_1\text{BDSIZE} + \beta_2\text{IND} + \beta_3\text{WOB} + \beta_4\text{AUDCOM} + \beta_5\text{CONC} + \beta_6\text{MANOS} + \beta_7\text{FOROS} + \beta_8\text{GOVOS} + \beta_9\text{PUBOS} + \beta_{10}\text{TA} + \beta_{11}\text{ROA} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

- CSDI : indeks pengungkapan CSR
BDSIZE : ukuran dewan komisaris
BIND : komisaris independen
WOB : proporsi wanita dalam dewan komisaris
AUDCOM : ukuran komite audit
CONC : konsentrasi kepemilikan

- MANOS : kepemilikan manajerial
 FOROS : kepemilikan asing
 GOVOS : kepemilikan pemerintah
 PUBOS : kepemilikan publik
 SIZE : proksi ukuran perusahaan, \ln total aset
 ROA : proksi profitabilitas, ROA
 ε_i : error item

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas terhadap model tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BDSIZE	48	2	9	5,60	1,455
BIND	48	,1667	,5000	,378252	,0874695
WOB	48	,0000	,3333	,054171	,0992087
AUDCOM	48	3	7	3,71	1,071
CONC	48	,0083799	,4975199	,305111657	,1391148422
MANOS	48	,0000000	,1794000	,015581042	,0438339682
FOROS	48	,0000000	,7727000	,173799583	,2515368610
GOVOS	48	,0000000	,6501700	,157491875	,2762307162
PUBOS	48	,0493000	,9484000	,368903958	,1847559816
SIZE	48	25,4387	31,8649	30,000635	1,4057621
ROA	48	-,2226	,3500	,071719	,1287488
CSDI	48	,1899	1,0000	,677743	,3038082
Valid N (listwise)	48				

Dari pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa rata-rata luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012 adalah sebesar 53,54166667 *item* (54 *item*) dari keseluruhan *item* pengungkapan CSR berdasarkan GRI yang berjumlah 79 *item*. Dengan indeks rata-rata sebesar 0,677742616 setiap perusahaan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan pada *annual report* mereka.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi dengan menggunakan variabel kontrol (Model 1), dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R² adalah 0,222. Hal ini berarti 22,2%

luas pengungkapan CSR perusahaan dipengaruhi variabel independen berupa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, wanita dalam dewan komisaris, komite audit independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan publik, ukuran perusahaan, dan *return on asset*. Sedangkan sisanya sebesar 77,8% diterangkan oleh faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. *Standard Error of Estimate* (SEE) menunjukkan nilai 0,2679040, hal ini menunjukkan nilai yang kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan hasil pengujian koefisien determinasi tanpa menggunakan variabel kontrol (Model 2) dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R² adalah 0,121. Hal ini berarti 12,1% luas pengungkapan CSR perusahaan dipengaruhi variabel independen berupa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite audit independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik.

	Model 1	Model 2
R	.636 ^a	.538 ^a
R Square	.404	.290
Adjusted R Square	.222	.121
Std. Error of the Estimate	.2679040	.2847858

Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,110	2,145		2,382	,023
	BDSIZE	,003	,044	,014	,066	,948
	BIND	,737	,650	,212	1,133	,265
	WOB	1,100	,487	,359	2,257	,030
	AUDCOM	,074	,050	,261	1,494	,144
	CONC	-,237	,550	-,108	-,431	,669
	MANOS	3,794	1,385	,547	2,739	,010
	FOROS	-,031	,296	-,025	-,104	,918
	GOVOS	,093	,239	,084	,388	,700
	PUBOS	,274	,346	,166	,790	,434
	SIZE	-,175	,071	-,808	-2,465	,019
	ROA	1,093	,508	,463	2,150	,038

Dari tabel di atas dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi dari penelitian ini, yang kemudian dapat disusun dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$\text{CSDI} = 5,110 + 0,003 \text{ BDSIZE} + 0,737 \text{ BIND} + 1,1 \text{ WOB} + 0,074 \text{ AUDCOM} - 0,237 \text{ CONC} + 3,794 \text{ MANOS} - 0,031 \text{ FOROS} + 0,093 \text{ GOVOS} + 0,274 \text{ PUBOS} - 0,175 \text{ SIZE} + 1,093 \text{ ROA}$$

Ringkasan Pengujian Hipotesis

H	Hipotesis	Signifikansi	Kesimpulan
H1	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR	0,948	Ditolak
H2	Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR	0,265	Ditolak
H3	Proporsi wanita dalam dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR	0,030	Diterima
H4	Komite audit berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR	0,144	Ditolak
H5	Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR	0,669	Ditolak
H6	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR	0,010	Diterima
H7	Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR	0,918	Ditolak
H8	Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR	0,700	Ditolak
H9	Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR	0,434	Ditolak

KESIMPULAN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mengarahkan perusahaan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang. Implementasi GCG dapat menciptakan situasi yang transparan dan akuntabel, serta terealisasinya tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Pelaksanaan aktivitas *corporate social responsibility* (CSR) merupakan salah satu langkah implementasi prinsip *responsibility* dalam GCG. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, namun baru sebatas diwajibkan pada sektor yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. *Corporate social responsibility* (CSR) diukur dengan menggunakan standar pelaporan GRI (*Global Reporting Initiative*). Penentuan sampel dilakukan dengan teknik

purposive sampling dan akhirnya didapat 48 *annual report* perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan periode tiga tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan 2012. Karakteristik *corporate governance* yang diuji yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan regresi berganda, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran dewan komisaris tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Menurut Febrina dan Suaryana (2011), hasil yang tidak signifikan dapat disebabkan karena ketidakefektifan dewan komisaris dalam menekan manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Faktor komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini berarti besar kecilnya proporsi komisaris independen tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Che Ahmad *et al.* (2003) dalam Hashim dan Devi (2008) menjelaskan alasan mengenai hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan karena komisaris independen tampaknya tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, sebab mereka tidak terlibat dalam operasional rutin perusahaan. Kapabilitas komisaris independen dalam rangka monitoring juga akan terbatas apabila pihak-pihak yang terafiliasi (non-independen) mendominasi dan mengendalikan dewan komisaris (Abdullah, 2004; Abdul Rahman dan Mohamed Ali (2006) dalam Hashim dan Devi, 2008).
3. Faktor proporsi wanita dalam dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Kondisi ini dapat terjadi karena proporsi dewan komisaris wanita yang lebih tinggi cenderung membuat rapat dewan lebih memungkinkan dan pola kehadiran yang khusus pada pertemuan dewan komisaris, dimana membuat dewan komisaris yang berbeda lebih sukses dibandingkan dewan komisaris yang homogen, dan sudah menjadi sifat wanita lebih menstabilkan dibandingkan laki-laki. Dengan adanya perbedaan gender dapat memunculkan keanekaragaman cara berfikir, sehingga dapat mempengaruhi dewan komisaris dalam mengambil suatu keputusan (Adams dan Ferreira, 2009 dalam Rao *et al.*, 2012).
4. Faktor komite audit independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini berarti besar kecilnya komite audit tidak akan

mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena komite audit tidak terlalu berpengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, karena sudah banyaknya perusahaan yang membentuk komite-komite lain yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti komite CSR dan komite GCG.

5. Faktor konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat konsentrasi kepemilikan tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Menurut Ghazali (2007), hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan karena tidak adanya klasifikasi konsentrasi kepemilikan. Arah yang berlawanan antara kepemilikan asing (negatif) dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan publik (positif), menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan perlu diklasifikasi.
6. Faktor kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Kondisi ini dapat terjadi karena semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dan kemudian manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray *et. al.*, 1995).
7. Faktor kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini berarti besar kecilnya proporsi kepemilikan oleh pihak asing tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Machmud dan Djakman (2008) menjelaskan alasan mengapa adanya kepemilikan asing dalam perusahaan di Indonesia tidak meningkatkan indeks GRI sebagai ukuran CSR adalah adanya kemungkinan jika kepemilikan asing ini dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di negara asal maka presentase kepemilikan tersebut sangat kecil, sehingga mereka menjadi kurang memperhatikan pengungkapan CSR sebagai suatu hal yang penting untuk diungkapkan kepada publik. Hasil yang diharapkan adalah kebudayaan pelaporan (*reporting culture*) perusahaan asing akan mempengaruhi anak perusahaan atau afiliasi, kemungkinan perusahaan asing atau multinasional lebih memilih menggunakan media alternatif lain daripada *annual report* untuk tujuan CSR mereka (Amran dan Devi, 2008).
8. Faktor kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini berarti besar kecilnya proporsi kepemilikan oleh pihak

pemerintah tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Di Indonesia memang kewajiban untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang bergerak dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam telah diatur oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Akan tetapi, kewajiban tersebut hanya sebatas kewajiban untuk melaporkan saja. Tidak ada standar baku yang mewajibkan berapa jumlah minimal item pengungkapan sosial yang diungkapkan.

9. Faktor kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini berarti besar kecilnya proporsi kepemilikan oleh publik tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Hal ini diduga karena kepemilikan saham publik merupakan gabungan dari seluruh saham-saham yang dimiliki masyarakat secara luas diluar institusional, manajerial, pemerintah, maupun asing, dan hanya memiliki hak minoritas sebagai *stakeholder* didalam suatu entitas, sehingga tidak memiliki pengaruh apapun ataupun memberikan tekanan kepada manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan (Putra, 2011).

REFERENSI

- Akhtaruddin, Mohamed, Monirul Alam Hossain, Mahmud Hossain, dan Lee Yao. 2009. "Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms". *JAMAR*. Vol. 7. No. 1, hal. 1-20.
- Amran, Azlan dan S. Susela Devi. 2008. "The Impact of Government and Foreign Affiliate Influence on Corporate Social Reporting (The Case Of Malaysia)". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol.23, No. 4, hal.386-404.
- Barkemeyer, Ralf. 2007. "Legitimacy as a Key Driver and Determinant of CSR in Developing Countries". *Sustainable Development Research Centre*. Scotland.
- Bernardi, Richard A dan Veronica H. Threadgill. 2010. "Women Directors and Corporate Social Responsibility". *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*. Vol. 15.No.2. Hal.15-21.
- Febrina dan I G N Agung Suaryana. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". *Symposium Nasional Akuntansi 14*.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Global Reporting Initiative. 2006. "G3 Guidelines". <http://www.globalreporting.org>, diakses 16 Februari 2013.

- Gray, Rob, Reza Kouhy, dan Simon Lavers. 1995. "Corporate Social and Environmental Reporting A Review of The Literature and A Longitudinal Study of UK Disclosure". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, hal47-77.
- Khan, Arifur, Mohammad Badrul Muttakin, dan Javed Siddiqui. 2012. "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy". *Journal Business Ethics*. Vol. 114. [No.2](#). Hal. 207-223
- Khan, [Md. Habib-Uz-Zaman](#). 2010. "The Effect of Corporate Governance Elements on Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: Empirical Evidence from Private Commercial Banks of Bangladesh". *International Journal of Law and Management*, Vol. 52. No. 2. Hal.82-109.
- Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Matoussi, Hamadi dan Raida Chakroun. 2008. "Board Composition, Ownership Structure, and Voluntary Disclosure in Annual Reports: Evidence from Tunisia". *Labaratoire Interdisciplinaire de Gestion Université-Enterprise (LIGUE)*. ISCAE.
- Mulia, Rizky. 2010. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Nugroho, Adiarto. 2008. "Pengaruh Implementasi Struktur Kepemilikan, Struktur *Good Corporate Governance*, dan Rasio Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI 2002-2006). *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Putra, Eka Nanda. 2011. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. UniversitasDiponegoro.
- Rao, Kathyayini Kathy, Carol A. Tilt, Laurence H. Lester. 2012. "Corporate Governance and Environmental Reporting: an Australian Study". *Corporate Governance*. Vol. 12, No. 2, Hal. 143-163
- Said, Roshima, Yuserrie Hj. Zainuddin, dan Hasnah Haron. 2009. "The Relationship Between Corporate Social responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies". *Social Responsibility Journal*. Vol. 5, No. 2, Hal. 212-226.
- Waryanto. 2010. "Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap LuasPengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.